**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Abdurrahman, Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia, (Jakarta : Cendana Press, 1983)

Acmad Irwan Hamzani, et.al., Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, Tegal t.p, 2023

AUSAID, YLBHI, PSHK, dan IALDF, Panduan Bantuan Hukum di Indonesia (Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Masalah Hukum), Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008

A.W. Widjaja, Administrasi Kepegawaian, Jakarta, Rajawali, 2006

Bambang Sunggono dan Aries Harianto, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, (Bandung, : CV. Mandar Maju, 2009)

Barry Matzger, legal Service to the Poor and National Development Objectives, dalam buku Legal Aid and World Poverty, ( preger Publishhers, 1974)

C.S.T. Kansil dan Christie S.T., Sistem Pemerintahan Indonesia, Cet. Pertama edisi revisi, (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2003)

Darman Primts, Hukum Acara Pidana Dalam Praktek, Penerbit Djambatan, 2002

Dr. H. Zuchri Abdussamad, S.I.K.,M.Si, Metode Penelitian Kualitatif, 2021

DR. YUHELSON, S.H.,M.H.,M.Kn.,Pengantar Ilmu Hukum,2017

Fahmi Amrusi dalam Ni’matull Huda, Hukum Pemerintah Daerah, Nusamedia: Bandung, 2012

Frans Hendra Winarta, Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan, Elex Media Komputindo,Jakarta, 2000

Frans Hendra Winata, Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum, (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2000)

Guntur Setiawan, Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan(Jakarta:Balai Pustaka,2004)

H.P. Penggabean, Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia, Terbitan Ke-1, Bandung: Penerbit Alumni, 2023

Inu Kencana Syafiie, Pengantar ilmu pemerintahan, Jakarta, Refika Aditama, 2010

Mauro Capelletti, toword equal justice; A comperative studyof legal Aid modern societies, (New york: Dobbs Ferry ,1975)

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Rosdakarya Musanef, Manajemen Kepegawaian di Indonesia, Jakarta, Gunung Agung, 2007

Sarundajang, Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah cetakan ke 3, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta

**Perundang-Undangan**

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tatacara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal

Peraturan Walikota Tegal Nomor 35 Tahun 2017 tentang Penjabaran Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal

Peraturan Walikota Tegal Nomor 24 Tahun 2019 tentang pedoman penanganan perkara di lingkungan Pemerintah Kota Tegal

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum

**Jurnal**

Atang Hermawan Usman, Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 30 No. 1, 2014

Zuhcri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif, Makasar: Syakir Media Press, 2021

**Artikel**

Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia,Jakarta: Cendana Press. 1993

La Ode Bariun, Hakikat Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Yang Berkeadilan. Disertasi. Program Pasca Sarjana. Universitas Hasanuddin. Makassar, 2015

Moh. Mahfud MD., Penataan Hukum Dalam Rangka Menuju Good Governance. Makalah disampaikan pada orasi ilmiah Dies Natalis Universitas Udayana, (Bali: 29 September 2010)

Pranoto, Implementasi Bantuan Hukum oleh Advokat terhadap Tersangka dan Terdakwa Tidak Mampu (Studi di Wilayah Pengadilan Negeri Purwokerto),Tesis, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Jenderal Soedriman, Purwokerto

Setya Retnami. Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, Jakarta : Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, 2001